

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Status kelola masyarakat di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman saat ini masih belum jelas karena belum memiliki izin resmi (secara tertulis) dalam pengelolaannya. Namun, pemerintah tetap mengizinkan masyarakat yang telah lama bermukim untuk tetap mengelola kawasan Tahura dengan mengeluarkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
2. Konflik yang terjadi di Tahura WAR, baik di wilayah SHK Lestari maupun Sumber Agung meliputi ketidaktenangan masyarakat karena adanya pengusiran-pengusiran paksa di masa lalu, adanya tumpang tindih hak atas tanah karena masyarakat memiliki sertifikat tanah di kawasan Tahura. Konflik tata batas antara lahan masyarakat sekitar hutan dengan Tahura WAR karena adanya kesalahan dalam penentuan tata batas yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
3. Masyarakat di Desa Sumber Agung maupun SHK Lestari memiliki keinginan yang sama yaitu, adanya legalitas dalam pengelolaan lahan di kawasan hutan Gunung Betung Register 19, sehingga mereka tidak lagi merasa khawatir dalam pengelolaannya.

B. SARAN

Diharapkan adanya kebijakan turunan dari peraturan daerah yang telah disahkan sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengelola lahan di kawasan Tahura WAR, agar konflik yang terjadi selama ini dapat terselesaikan dan masyarakat pun lebih sejahtera serta hutan tetap lestari.